

## METODE REFLECT DALAM *COMMUNITY DEVELOPMENT* (CD)

Daman

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

**Abstrak** : Implementasi Metode Reflect (*Regenerated Freirean Literacy Through Empowering Community Techniques*) adalah proses pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran (*awarenes*) serta tindakan (*action*) untuk melakukan perubahan karena kesadaran individu berperan untuk dapat mengubah sikap dan perilaku.

Implementasi Reflect sangat efektif untuk membelajarkan menulis dan membaca. Dampak penggunaan metode Reflect adalah adanya peningkatan kemampuan warga belajar dalam menganalisa dan memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan mereka mengemukakan ide-ide dan adanya peningkatan partisipasi.

**Kata Kunci** : Metode reflect, community development.

Paradigma baru pembangunan dengan pendekatan kebutuhan dasar manusia atau *basic human needs* mengacu kepada pencapaian tujuan yang tidak hanya pada pencapaian aspek sosial-ekonomi, melainkan memasuki kawasan mendasar dari kehidupan, manusia (*human being*) yaitu masalah-masalah demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia. Semua aspek tersebut menjadi kajian utama pembangunan dewasa ini, dengan jargon pembangunan yang berpusat pada rakyat (*grassroots oriented*).

Secara implementatif, penerapan model pendekatan atau paradigma pembangunan berbasis masyarakat memberi peran kepada individu bukan sebagai objek melainkan sebagai pelaku/subjek pembangunan, mulai dari perumusan tujuan, pengendalian sumber daya dan pengarahan proses pembangunan yang akan dapat mempengaruhi kehidupannya.

Dewasa ini, semakin disadari bahwa pendidikan luar sekolah baik sebagai suatu strategi dan pendekatan pembangunan masyarakat, sebagai proses maupun sebagai satuan program, semakin menduduki posisi strategis dalam menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Hal tersebut mudah dipahami mengingat secara umum, masalah dan tantangan pendidikan luar sekolah secara implisit melekat seiring dengan masalah dan tantangan pembangunan itu sendiri.

Beberapa hal yang menggembirakan, implementasi dan pengembangan strategi metodologi pembangunan masyarakat (CD) terus diupayakan oleh para akademisi maupun praktisi. Salah satu metodologi *community development* yang diadaptasikan ke dalam

kegiatan keaksaraan (*literacy*) orang dewasa dalam pemberdayaannya yang dikenal dengan metode reflect. Secara teoritis metode ini dikembangkan dari konsepsi Paulo Freire yang implementasinya telah diterapkan dalam PRA (*Participatory Rural Appraisal*) ataupun metode partisipatori lainnya. Metode reflect dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip, alat dan teknik yang dikembangkan oleh para praktisi PRA. Pendekatan reflect memungkinkan untuk berkembangnya dinamika di dalam masyarakat dan dapat membatasi peran fasilitator yang berasal dari luar. Dalam metode Reflect, penduduk lokal berperan secara aktif dari sejak awal dan dapat mengendalikan keseluruhan proses metode ini. Proses belajar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, dipadukan secara logis dan berkembang secara alami. Kegiatan ini mencakup perluasan pengetahuan kita mengenai keaksaraan dan memperlihatkan kedekatan hubungan antara kegiatan keaksaraan, kekuatan dan kelemahan pada setiap tingkat. Metode Reflect bukan lagi merupakan suatu metode yang berakar pada sikap saja, namun perkembangan penggunaan metode ini juga mencakup hubungan antara tatanan kekuatan mikro dan makro serta penekanan akan kebutuhan kelembagaan seperti kebutuhan akan adanya perubahan individu.

Hasil uji coba yang dilakukan di beberapa negara Afrika dan Amerika Latin dan bahkan telah berkembang di wilayah Asia, antara lain menyimpulkan:

1. Peserta dari ketiga program tersebut berbicara atas kesadaran dirinya sendiri

- sebagai salah satu keuntungan yang diperolehnya dari metode reflect. Kebanyakan dari mereka telah meningkatkan kemampuannya dalam menganalisa dan memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengemukakan ide-ide.
2. Adanya peningkatan partisipasi dalam organisasi masyarakat merupakan hasil nyata dari metode Reflect di Uganda dan El Salvador. Terlebih lagi, sebanyak 61% orang yang belajar dengan metode ini melaporkan bahwa mereka sekarang memiliki kedudukan formal dan tanggung jawab pada organisasi masyarakatnya.
  3. Diskusi yang diadakan di kelas-kelas keaksaraan seringkali mengacu pada tingkat kegiatan masyarakat untuk memperbaiki keadaan daerahnya. Kegiatan ini berkisar dari lingkup ekonomi (pengaturan penyebaran padi, diversifikasi tanaman, kerjasama dalam penjualan dan pembelian) ke lingkup proyek-proyek masyarakat (infrastruktur yang kecil seperti memperbaiki jalan, sekolah, dan saluran air); dari lingkup lingkungannya sampai ke lingkup kesehatan.
  4. Perkembangan yang terjadi juga memperlihatkan bahwa metode reflect telah memberikan pengaruh positif pada pengelolaan sumber daya manusia baik pada tingkat individu maupun pada tingkat keluarga.

Berangkat dari kajian konseptual pembangunan masyarakat (*community development*), pengembangan inovasi pada *Community Development* dalam bentuk metode reflect, peran strategic, masalah dan tantangan pendidikan luar sekolah.

Hasil kajian lapangan melalui analisis pelaksanaan pekerjaan (*job analysis*), diperoleh gambaran adanya kecenderungan bahwa kondisi pamong belajar dalam kaitannya dengan *community development* belum seluruhnya menunjukkan profesionalisme, terutama dalam pencapaian kompetensinya. Beberapa indikasi yang menunjukkan kondisi tersebut antara lain: 1) lemahnya pemahaman dan penghayatan konsep *community development*, 2) kurangnya penghayatan pra kondisi dalam memotivasi, memfasilitasi,

advokasi masyarakat, 3) lemahnya kemampuan mengelola program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, 4) kurangnya kemampuan dalam penguasaan dan penerapan strategi, pendekatan, dan teknik pembangunan, keswadayaan masyarakat serta belum mandiri dalam mengambil putusan yang mempertimbangkan berbagai aspek terkait, 5) masih kurangnya pemahaman dan belum diimplementasikannya metode reflect sebagai inovasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan.

### **1. Pengertian Pengembangan Masyarakat / Komuniti (Community Development)**

Masyarakat beserta kebudayaan yang ada di dalamnya senantiasa akan mengalami perubahan, baik perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat. Perubahan-perubahan ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena pengetahuan dan keadaan fisik masyarakat akan berkembang. Perubahan secara cepat menjadi tidak wajar apabila kemampuan masyarakat dengan pengetahuan yang ada tidak dapat memahami perubahan gejala sosial yang ada.

Perubahan yang berjalan cepat umumnya disebabkan karena adanya sebuah atau beberapa buah program pembangunan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang merubah kebiasaan sehari-hari. Atau juga adanya komuniti-komuniti lain yang hidup dalam areal bersama sebagai suatu masyarakat yang berbeda pola hidup antar masing-masing komuniti. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial.

Beroperasinya sebuah perusahaan haruslah mengingat dan memperhatikan keadaan gejala sosial budaya yang ada di sekitarnya, sehingga dengan adanya pergerakan sosial budaya komuniti-komuniti sekitar yang nyata-nyata bervariasi, akan dapat menghambat berjalannya perusahaan itu sendiri, seperti munculnya kecemburuan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan yang sangat jauh berbeda antara perusahaan (pegawai perusahaan) dengan komuniti-komuniti sekitar.

Memang dengan keberadaan suatu perusahaan di suatu daerah, maka akan dapat mendorong bermunculannya kegiatan-kegiatan sosial ekonomi komunitas sekitarnya, seperti adanya perusahaan-perusahaan jasa penunjang kehidupan perusahaan yang besar. Akan tetapi kemunculan perusahaan jasa ini pada umumnya berasal dari luar komunitas lokal dengan model usaha yang berbeda dengan komunitas lokal.

Untuk meningkatkan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan perusahaan atau paling tidak untuk menjaga kemunculan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota komunitas lokal dengan perusahaan atau dengan pendatang lainnya diperlukan suatu cara untuk meningkatkan daya saing dan mandiri komunitas lokal. Kemudian untuk itu diperlukan suatu wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut sebagai *community development* untuk menciptakan kemandirian komunitas lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri. Disini tampak bahwa industri merupakan sebuah komunitas pendatang yang berusaha di daerah komunitas lokal sebagai pemegang hak ulayat, serta komunitas pendatang lainnya yang hidup atau mencari kehidupan di daerah tersebut. Kesemua komunitas ini dengan ciri sosial budaya serta suku bangsa dan pola kehidupan yang berbeda, hidup dalam satu kesatuan masyarakat.

Secara hakekat, *community development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas-komunitas lokal. Artinya bahwa industri adalah sebuah elemen dari serangkaian elemen hidup yang berlaku di masyarakat. Sebagai salah satu elemen, berarti industri masuk dalam struktur sosial masyarakat setempat dan berfungsi terhadap elemen lainnya yang ada. Dan dengan kesadarannya, industri harus dapat membawa komunitas-komunitas lokal bergerak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada (Rudito,

2003). Dengan kata lain masyarakat terdiri dari komunitas lokal, komunitas pendatang dan komunitas industri, yang kesemua komunitas tersebut saling mempengaruhi, berinteraksi dan beradaptasi sebagai anggota masyarakat.

Lebih jauh berarti adanya kesetaraan, saling menghargai dalam sosial budaya yang beragam atau multikultural. Kesetaraan sebagai suatu kesatuan komunitas, saling menghargai dan mengakui adanya perbedaan yang berarti tidak adanya usaha untuk saling mendominasi antar masing-masing *stakeholder* yang didalamnya terkandung pengutamaan hak azasi manusia. (Rudito, 2003; Prasetyo, 2003).

Secara umum *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2002).

Prinsip dasar pengembangan masyarakat (*community development*) yang bersumber dari dunia usaha dan pemerintah pada dasarnya masih memandang komunitas lokal, sebagai obyek yang harus diperhatikan dan dirubah agar dapat setara kehidupannya dengan komunitas lainnya dan mandiri.

Berbeda dengan pandang pemerintah dan perusahaan, banyak anggapan dari komunitas lokal dan komunitas pendatang yang bukan industri melihat industri pertambangan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bahkan lebih merupakan suatu bencana. Anggapan ini didasari adanya posisi pemerintah dan dunia usaha (industri) adalah sebagai pendatang dengan kekuatan ekonomi dan politik yang mencari kehidupan di wilayah mereka.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah dan pihak industri seharusnya memastikan keber-lanjutan investasinya melalui program-program keterlibatan

komuniti lokal, pendekatan kemitraan, mengembangkan pola-pola adaptasi dunia usaha terhadap komuniti lokal dan mengembangkan kepemilikan komuniti lokal.

Keterkaitan yang erat antara industri sebagai anggota masyarakat dengan kehidupan masyarakat (termasuk didalamnya komuniti lokal) sangat mutlak dilakukan, dengan demikian maka kegiatan industri dapat beradaptasi dengan kegiatan sosial ekonomi komuniti lokal dan juga aktifitas keseharian yang ada dalam masyarakat. Program *community development* disini menjadi penting kemudian untuk dibicarakan. Pertanyaan berikutnya adalah program *community development* seperti apa yang harusnya dikembangkan pada industri di lingkungan sektor energi dan sumber daya mineral.

## 2. Pentingnya Program Community Development

Ada tiga alasan penting mengapa perusahaan dan pemerintah melakukan kegiatan *community development*;

### 2.1. Izin Lokal Dalam Mengembangkan Hubungan Dengan Komuniti Lokal.

Indonesia sebagai suatu masyarakat bangsa yang bersifat majemuk pada dasarnya mempunyai model masyarakat yang dapat dibagi kedalam tiga tipe dengan dasar kebudayaan yang mempengaruhinya, ketiga tipe masyarakat tersebut terbagi dalam cakupan administrasi dan kebudayaan yaitu nasional dengan kebudayaan nasional sebagai acuannya (UUD 45 dan Pancasila), yang kemudian diterjemahkan ke dalam wujud propinsi pemerintah daerah sebagai tipe kedua yang didominasi oleh masyarakat suku bangsa yang mayoritas atau campuran dari berbagai komuniti, dan bentuk ketiga adalah komuniti lokal yang kewilayahannya didasari oleh hak ulayat kesukubangsaan. Dari tipe secara hirarkis ini tampak adanya penguasaan kewilayahannya didasari pada model kebudayaan yang

meliputinya yang kadang-kadang bertolak belakang satu sama lainnya.

Pada umumnya sebuah perusahaan mendapatkan izin beroperasi dari suatu instansi formal dalam hal ini departemen sebagai perwujudan kebudayaan nasional dan juga pemerintah daerah dengan acuan otonomi daerah, akan tetapi tidak pernah meminta izin dari komuniti lokal (izin lokal) sebagai pemilik hak ulayat wilayah perusahaan. Izin lokal yang dimaksudkan disini berarti melibatkan komuniti lokal dalam cakupan usaha perusahaan, dan perusahaan sebagai suatu komuniti pendatang dengan komuniti lokal secara bersama-sama memperoleh keuntungan usaha. Seperti merekrut pekerja dari dalam komuniti lokal, membangun usaha dengan komuniti lokal, menciptakan keterkaitan usaha dengan perusahaan-perusahaan jasa penunjang yang ada di masyarakat. Ini berarti perusahaan akan dapat menghargai keberadaan sosial budaya komuniti lokal setempat yang tentunya berbeda dengan kebudayaan perusahaan itu sendiri yang didasari pada acuan nasional.

Izin lokal merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan oleh komuniti perusahaan dalam rangka melanggengkan kegiatannya di wilayah hak ulayat komuniti lokal sebagai bagian dari masyarakat. Sehingga izin lokal mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan legalitas dari Nasional dan Pemerintah Daerah. Apalagi dalam era reformasi dan otonomi daerah yang memprioritaskan hak ulayat komuniti lokal.

Dengan izin lokal maka perusahaan dapat meminimalkan resiko pengeluaran biaya yang lebih banyak terhadap kelompok anggota masyarakat yang tergolong miskin yang ada di lokasi. Artinya adalah

perusahaan dengan programnya dapat bekerja sama dengan komuniti-komuniti yang ada sehingga dapat ikut terlibat dalam jenis-jenis usaha penunjang perusahaan yang ada, sehingga pengeluaran biaya secara donor terhadap anggota masyarakat yang tergolong miskin yang ada di sekitarnya dapat tertanggulangi oleh adanya jasa penunjang ini.

## **2.2. Mengatur Dan Menciptakan Strategi Ke Depan Melalui Program Community Development**

Dengan beradaptasinya perusahaan dengan kehidupan sosial budaya komuniti lokal maka perusahaan dapat memperoleh dan menciptakan strategi pengembangan usahanya dengan melalui kerjasama yang proaktif melalui program *community development*. Reputasi hubungan baik antara perusahaan dengan komuniti lokal dalam *community development* dapat menciptakan kesempatan usaha yang baru. Terciptanya mata rantai suplai dan usaha diantara keterkaitan komuniti-komuniti yang ada dan perusahaan dapat melanggengkan kehidupan beroperasinya perusahaan.

Mata rantai usaha yang dibuat yang berbasis pada pranata sosial yang ada di komuniti lokal secara fungsional dapat menunjang usaha yang dilakukan oleh perusahaan melalui program-program yang terencana yang terdapat dalam *community development*. Usaha-usaha komuniti lokal ini selain juga meningkatkan pendapatan komuniti lokal juga memudahkan perusahaan dalam memperoleh apa yang diinginkan oleh perusahaan sebagai suatu ikatan kerja dan usaha.

## **2.3. Program Community Development Sebagai Cara Untuk Membantu Pemenuhan Sasaran Usaha.**

Komuniti lokal walau bagaimanapun memiliki hak ulayat dari wilayah yang ada, tetap masih termasuk kedalam

lingkup masyarakat Indonesia, sehingga mau tidak mau dalam melakukan interaksinya antar sesama anggota masyarakat Indonesia akan menggunakan model kebudayaan nasional. Pembangunan sebagai suatu program nasional akan diinterpretasi oleh anggota komuniti-komuniti dan menjadikannya sebagai suatu tujuan bersama. Begitu juga dengan usaha-usaha yang ada di masyarakat akan juga mengacu pada kebudayaan nasional, segala pembangunan yang bersumber dari nasional akan juga menjadi milik dari masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai tambahan untuk membantu perusahaan memperoleh izin lokal (*local license*) untuk beroperasi, program-program *community development* dapat ditargetkan untuk mendapatkan sasaran usaha. sasaran-sasaran tersebut termasuk:

- a) Menangani isu pembangunan yang dapat secara langsung berakibat pada usaha perusahaan, seperti kesehatan masyarakat, pendidikan.
- b) Memfasilitasi konsultasi umum dan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat lokal dalam isu-isu usaha, seperti kontrol polusi, kompensasi dan perumahan.
- c) Membangun hubungan positif dengan pemerintah daerah. Hal ini mutlak dilakukan guna kesinambungan kegiatan pengabsahan dari perusahaan, karena pada masa kini otonomi daerah sangat memegang peranan penting dan perusahaan yang ada merupakan aset dalam pemerintah daerah
- d) Membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat
- e) Mengembangkan kualitas staff melalui pekerja sosial yang secara tidak langsung maupun langsung berkenaan dengan kehidupan komuniti lokal.

Kualitas disini dimaksudkan adalah pengetahuan tentang kondisi sosial budaya komuniti lokal

- f) Meningkatkan moral staff dan membangun rasa berusaha pada pekerja lokal. Diharapkan para staff dapat bekerja sama dan mempunyai keinginan untuk bisa berkolaborasi dengan individu sebagai anggota komuniti lokal untuk dapat mengembangkan usaha yang bersifat dan berdasar pada komuniti lokal

Program-program *community development* mempunyai potensi untuk meningkatkan nilai usaha terhadap perusahaan. Nilai usaha ini hanya dapat dimaksimalkan ketika perusahaan merencanakan strategi program *community development* melalui:

- a) **Pendefinisian sasaran.** Perusahaan harus dapat mengidentifikasi keuntungan usaha potensial dari *community development* perusahaan. Ini dapat menolong membentuk basis untuk merencanakan tujuan dan sasaran dari perusahaan
- b) **Memahami harapan komuniti dan Stakeholder.** Memiliki pemikiran bahwa komuniti-komuniti mempunyai harapan yang berbeda dengan *stakeholder*, dan ini dapat membantu untuk meramalkan dan menganalisa potensi konflik dan harapan-harapan secara umum. Membuat program dari tujuan umum komuniti sehingga dapat membantu perusahaan dan komuniti-komuniti untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kemampuan, transparansi dan mendefinisikan tujuan dan sasaran secara bersama.
- c) **Membentuk kerjasama untuk mempromosikan *community development* sebagai unit**

**usaha.** *Community development* lebih seperti suatu hal yang memberi keuntungan dan mendapatkan dukungan dari perusahaan jika *community development* memasukkan *stakeholder* yang ada ke dalam perusahaan. Senior managers, staff lingkungan, personil operasi, staff sumber daya manusia, masyarakat dan staff hubungan masyarakat dan organisasi pekerja, seluruhnya dapat memberi keuntungan dari program *community development* yang kuat

### 3. RUANG LINGKUP COMMUNITY DEVELOPMENT

Secara umum ruang lingkup program-program *community development* dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut (Budimanta, 2003:43) :

- 1) *Community Services*; merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana transportasi/jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, peningkatan/perbaikan sanitasi lingkungan, pengembangan kualitas pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan (bantuan tenaga paramedic, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan permukiman), keagamaan dan lain sebagainya
- 2) *Community Empowering*; adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Berkaitan dengan program ini adalah seperti pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti lokal, organisasi profesi serta peningkatan

kapasitas usaha masyarakat yang berbasis sumber daya setempat.

- 3) *Community Relation*; yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Seperti konsultasi publik, penyuluhan dan sebagainya.

### **Prinsip-prinsip kunci dalam mendefinisikan cakupan program Community Development.**

#### **a. Memanfaatkan informasi yang tersedia**

Segala informasi dapat digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan apa saja yang dianggap sebagai penentu dalam cakupan program seperti pemetaan sosial dan hasil dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, termasuk di dalamnya:

- ◇ Data-data penduduk yang bisa diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) potensi desa.
- ◇ Data-data dari media massa tentang kerawanan sosial, konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang ada.
- ◇ Laporan-laporan rencana pemerintah pusat atau pernerinti daerah.
- ◇ Hasil-hasil studi dari universitas, cakupan kerja LSNI atau catatan dari kelompok lokal.
- ◇ Analisis mengenai dampak lingkungan termasuk mengenai analisis dampak sosial.
- ◇ Survey yang didanai oleh perusahaan.

#### **b. Menggunakan metode partisipatori**

Proses pendefinisian cakupan program untuk program *community development* adalah kesempatan untuk membangun partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan perusahaan melalui staf *community development* di dalam aktivitas yang berlangsung di masyarakat maka

dapat diidentifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh komuniti lokal secara emik.

#### **c. Membangun kepercayaan dari hal-hal yang sederhana**

Membangun kepercayaan komuniti dalam program *community development* adalah esensi untuk menciptakan partisipasi dan kesinambungan proyek. Dimulai dari hal yang hal yang kecil, proyek-proyek yang mudah diatur kembali terutama yang berkaitan dengan membantu pembangunan kapasitas organisasi dalam komuniti dan mengembangkan hubungan kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat dari luar wilayah.

#### **d. Membuat program *community development* dalam suatu lingkaran proyek**

Waktu dan kesempatan dari aktivitas program *community development* adalah sesuatu yang penting. Konsultasi dengan masyarakat lokal yang perduli dengan perusahaan dan aktivitas *community development* dengan memperhatikan ukuran kerja proyek dan besaran sosial dari masyarakat perlu dilakukan.

## **4. METODE REFLECT**

Menurut pendapat Paulo Freire seorang ahli pendidikan keaksaraan Brazil dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat adalah kelompok yang cenderung membebani masyarakat atau adanya kelompok penekan dan kelompok yang merasa ditekan. Suasana kehidupan masyarakat yang merasa tertekan, pada umumnya akan menderita kemiskinan dan keterlantaran pendidikan. Suasana kehidupan yang miskin dan terlantar dalam bidang pendidikan oleh Freire seperti dikutip D. Sudjana (2000; 69) disebutnya sebagai "*kebudayaan diam*". Menurut Freire kebudayaan, diam/bisu adalah: "*kondisi kultural sekelompok masyarakat yang ciri utamanya adalah ketidakberdayaan dan ketakutan umum untuk mengungkapkan*

*pikiran dan perasaan sendiri* “ (Freire; 2000; 12).

Lebih lanjut Freire memandang bahwa sekolah merupakan wahana paling ampuh untuk mentransformasikan kebudayaan diam tersebut kepada masyarakat. Lahirnya kebudayaan diam ini, diakibatkan oleh ketidak-mampuan pendidikan sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk mampu berfikir kritis, sehingga mereka dapat menggali, menganalisis dan memecahkan masalah kehidupan yang terjadi dalam masyarakat.

Berkenaan dengan itu, rekomendasi Freire yang paling penting adalah bahwa : *seharusnya pendidikan merupakan gerakan pembebasan dan penyadaran (conscientizacao) manusia*. Sebagai gerakan pembebasan, pendidikan harus dapat melepaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan tekanan dari pihak luar. Sedangkan sebagai gerakan penyadaran, dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran diri warga masyarakat terhadap lingkungannya, dan memahami pentingnya peranan mereka dalam upaya meningkatkan dan mengubah lingkungan ke arah yang lebih baik. Dalam pendidikan pembebasan, warga masyarakat sebagai peserta didik dipandang sebagai subyek yang aktif dan potensial. Lebih jauh Freire menandakan bahwa model pendidikan yang tidak mampu membangkitkan kesadaran diri pada para peserta didik dan masyarakat adalah tidak manusiawi, dan oleh karena itu jangan diberi hak hidup. Melalui pendidikan pembebasan, warga masyarakat dirangsang untuk mampu mengenali, menggali, dan menemukan masalah-masalah yang dihadapi untuk kemudian mencari jalan pemecahannya melalui akilvitanya di kelompok belajar.

Pendidikan keaksaraan akan efektif apabila dalam pelaksanaan programnya menggunakan pendekatan pembelajaran yang mengikutsertakan secara aktif semua warga belajar dan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran. Keikutsertaan itu diutamakan pada upaya pemecahan masalah

(*problem solving*). Untuk sampai kepada pemecahan masalah maka dalam kegiatan pembelajaran perlu diciptakan dan digunakan metode atau teknik pemunculan masalah yang diistilahkan oleh Freire “*problein possing*”. Dalam pemunculan masalah ini, para anggota masyarakat/warga belajar melakukan pengenalan masalah, menggambarkan, dan menganalisis masalah. Sebagai tindakan (*action*) pemecahan masalah tersebut, anggota masyarakat atau warga belajar berfikir secara kreatif dan bertindak untuk menghadapi dan berupaya memecahkan masalah itu.

Berdasarkan uraian di atas, agar program keaksaraan memiliki nilai guna dan nilai sebagai dan tambah yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wahana pembebasan dirinya dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, serta dapat menjadi wahana dalam peningkatan ekonomi, sosial maupun politiknya, maka salah satu upayanya adalah perlunya menerapkan metode Reflect dalam proses pembelajaran di kelompok belajar, sehingga program keaksaraan fungsional tersebut dapat dirasakan manfaatnya, terutama warga belajar yang menjadi peserta didiknya. Hal ini juga sangat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hasil *Sub Regional Workshop on Research Design on Functional Literacy Level* pada tahun 1993 yang menyatakan bahwa keaksaraan harus dirumuskan secara fungsional. Dengan demikian program keaksaraan fungsional harus bersifat kontekstual dan berkelanjutan, serta dapat memotivasi dan memberdayakan warga masyarakat yang menjadi sasaran didiknya.

Agar mencapai tujuan tersebut, tentu saja komponen-komponen sistem penyelenggaraan program keaksaraan fungsional perlu dirubah dan diperbaiki, salah satunya adalah penerapan metode Reflect dalam pembelajaran pada program keaksaraan fungsional dimaksud. Karena metode ini menyediakan metodologi lebih praktis bagi pelaksanaannya, terutama dalam hal memotivasi dan memberdayakan, membuka wacana berfikir dan keterbukaan bagi warga belajar atau dalam hal belajar

berdemokrasi, seperti yang diharapkan oleh Paulo Freire.

Metode Reflect awalnya dikembangkan oleh *Action Aid* yang berpusat di London pada tahun 1993, dengan menggabungkan teori dari Paulo Freire sebagai mana yang dikemukakan di atas, dan praktek/pelaksanaan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) seperti metode membuat tabel, peta, diagram, garis waktu, kalender, dan *transect-walk* (melintasi kawasan/lingkungan dengan berjalan jalan untuk mengetahui situasi dan kondisi setempat), dalam proses pembelajaran keaksaraan fungsional. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Archer & Cottingham bahwa: “REFLECT is a new approach to adult literacy which fuses the theory of Paulo Freire and the practice of Participatory Rural Appraisal (Reflect merupakan metode atau pendekatan terbaru untuk pendidikan keaksaraan prang dewasa yang menggabungkan teori dari Paulo Freire dan praktek/ pelaksanaan PRA).

PRA (*Participatory Rural Appraisal*) sendiri awalnya merupakan suatu metode pengkajian pedesaan secara partisipatif yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan (*Chambers; 1992; 5*).

REFLECT merupakan kepanjangan dari *Regenerated Freirean Literacy trough Empowering Community Techniques* (pengembangan kembali teori keaksaraan Paulo Freirean melalui teknik pemberdayaan masyarakat). Metode Reflect sangat berperan dalam upaya terjadinya proses pemberdayaan (*empowering*) melalui penyadaran (*awarenes*) serta tindakan (*action*) untuk melakukan perubahan, karena kesadaran individu berperan untuk dapat mengubah sikap dan perilaku mereka. Jadi Reflect selain sebagai metode pembelajaran, juga berguna untuk menggali minat dan kebutuhan belajar WB, mengembangkan pandangan berdasarkan pengalamannya, menciptakan inovasi-inovasi baru dalam proses dan hasil pembelajarannya.

Metode Reflect ini juga sangat

efektif untuk membelajarkan seseorang dalam belajar menulis dan membaca, juga lebih efektif dalam memperluas perkembangan kegiatan keaksaraan. Dampak penggunaan metode Reflect adalah adanya peningkatan kemampuan warga belajar dalam menganalisa dan memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengemukakan ide-ide, dan adanya peningkatan partisipasi. Kecepatan pembelajaran dengan menggunakan Reflect berupaya menghubungkan langsung dengan kegiatan masyarakat dimana mereka tinggal, sehingga dapat memperbaiki keadaan daerahnya, memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan sumber daya manusia baik individu maupun kelompok. Penerapan secara benar metode ini akan dapat memotivasi warga belajar dalam belajar dan dapat mempercepat belajar *ca-lis-tung* pada warga belajar program keaksaraan fungsional, karena metode Reflect mengedepankan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, pengalaman, dan situasi yang dihadapi warga belajar dalam kehidupan sehari-hari.

Di dalam metode Reflect, tercakup cita-cita dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat diupayakan agar memiliki pandangan terbuka pandangan terhadap keadaan kehidupannya sendiri dan lingkungannya, serta memiliki kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu diperlukan proses penyadaran, pembelajaran, penyuluhan dan pengalihan keterampilan fungsional kepada masyarakat dari orang terdidik kepada masyarakat yang tuna aksara.

Alasan digunakannya metode Reflect dalam program keaksaraan fungsional adalah karena, selain metode ini diyakini efektif juga mengandung unsur penggerakkan (pemberdayaan) individu dalam kelompok atau masyarakat secara keseluruhan dan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (aspek gender). Antara warga belajar dan Tutor dan adanya interaksi antara teori dan praktek dan antara warga belajar dengan lembaga/instansi yang ada disekitar lingkungan warga belajar.

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode Reflect dilakukan melalui daur berikut : refleksi-aksi-dan refleksi kembali (*reflection-action-and other reflection*). Dengan menggunakan daur ini dalam proses pembelajaran keaksaraan fungsional, maka akan menumbuhkan kesadaran warga belajar atau warga masyarakat yang responsif terhadap kenyataan hidup dan lingkungan, serta dapat bertindak untuk meningkatkan kehidupan dan memperbaiki lingkungannya. Prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode Reflect ini, ialah masyarakat sendiri yang berfikir dan berbuat (*reflection-action*) terhadap dan di dalam dunia kehidupannya.

Reflect juga berguna untuk mengembangkan materi-materi belajar sendiri melalui pembuatan peta, kalender, matriks dan diagram-diagram konstruktif yang mewakili kenyataan yang ada di daerah setempat, dengan memperhatikan pengetahuan lokal dari warga belajar dan menganalisa masalah-masalah lokal secara terperinci, seperti yang digunakan dalam metode PRA. Contohnya pemetaan rumah tangga, peruntukkan tanah atau kepemilikan tanah, kalender tentang pebagian kerja, penyakit atau penghasilan, musim tanam dan panen, sumber-sumber pemberi kredit atau partisipasi lembaga setempat dan sebagainya.

Untuk itu, proses pembelajaran keaksaraan fungsional dengan metode Reflect ini, warga belajar diberi kesempatan untuk mengembangkan sendiri materi-materi belajarnya, sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap rencana belajar dan rencana kerja/aksi yang berasal dari gagasan mereka, sehingga pada akhirnya mengubah perilaku dan sikapnya. Dalam proses belajarnya, baik warga belajar maupun Tutor sama-sama belajar, dan sama-sama memiliki kesempatan untuk merefleksikan kembali peran dan posisi masing-masing serta menggali potensi yang ada di dalam diri mereka untuk berubah ke arah yang lebih positif. Tiap orang memiliki potensi yang dapat dimotivasi, dikembangkan dan diberdayakan, karena itu dalam proses pembelajaran keaksaraan fungsional baik

warga belajar maupun Tutor harus dapat berkembang secara mandiri.

Di dalam proses pembelajaran keaksaraan fungsional antara warga belajar dan Tutor saling belajar, masing-masing mengemukakan ide dan menganalisa kehidupannya, mengidentifikasi keberadaannya, dan menggali potensi yang ada di dalam diri mereka untuk merubah kearah yang lebih positif. Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang dan berdaya/berbuat. Proses belajar dalam program keaksaraan fungsional, warga belajarlah yang memutuskan isinya. Peran Tutor adalah untuk mengembangkan proses analisa, bukan mendikte isinya. Hal ini bukan berarti bahwa Tutor tidak dapat memberikan pengalamannya dan pandangannya, karena Tutor juga merupakan peserta dalam keseluruhan proses. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan Reflect, Tutor dan warga belajar terjadi interaksi belajar multi arah, dimana mereka berbagi pengalaman baru antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian peran Tutor sangat penting dalam "*mensintesa pembelajaran*" di kelompok belajar.

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode Reflect, misalnya terdiri dari penggunaan peta, tabel, diagram, transek sebagai alat penggali atau identifikasi kebutuhan belajar mereka dan sebagai sarana dalam proses pembelajaran di kelompok belajar. Sebagai contoh, misalnya teknik peta digunakan untuk menentukan lokasi dan mencari masalah serta sumber-sumber pemecahan. Hal ini diajarkan semenjak seorang warga belajar memasuki kelompok belajar. Bahkan bisa dipastikan bahwa orang yang buta huruf sekalipun dapat dibelajarkan melalui peta. Yang merupakan salah satu cara dari metode pembelajaran Reflect. Karena paling tidak mereka memiliki informasi yang berkaitan dengan dunia kehidupan nyatanya. Dalam hal ini, misalnya mereka diminta untuk menyampaikan informasi dimana cetak rumahnya, dimana balai desa sekolah, puskesmas berada dan sebagainya. Melalui penerapan metode Reflect sebagaimana

yang telah dijelaskan di atas, para warga belajar dapat belajar dari pengalaman sendiri (BDPS), melakukan pengkajian dan penemuan-penemuan baru, sekaligus penemuan kegagalan-kegagalan yang telah dialami dalam penerapan metode ini.

#### **Kesimpulan**

Metode Reflect adalah suatu proses belajar partisipatif yang dikemas dengan baik guna memfasilitasi analisis kritis warga belajar dan atau masyarakat terhadap lingkungannya, dengan menempatkan pemberdayaan sebagai jantung

pengembangannya. Melalui penciptaan proses demokrasi dan konstruksi serta interpretasi teks yang dikembangkan secara lokal. Dalam hal ini warga belajar atau warga masyarakat yang menjadi sasaran sidik membuat analisis yang multi dimensi tentang kenyataan hidup baik lokal maupun global, menjawab tantangan paradigma pembangunan yang didominasi dan mendefinisikannya kembali dalam bentuk kekuatan/hubungan atau kerjasama baik lingkungan khusus maupun umum.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Comptens, Hubert, (1999), *Comunity Development Around the World : Practice, Theory, Research, Traning*, Toronto, University of Toronto Press

Knowles, M.S, (1976), *The Modern Pactice of Adult Education*, New York Cambridge Body.

Freire, P. (1970), *The Adult Literacy Process as Cultural Action for Freedom*, Havard Education Review.

Bambang Rudito, (2003), *Pengelolaan Comunity Development*, ICSD, Jakarta.